

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Adrian W. Bedner, *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Huma, Jakarta, 2010

ArdianSutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet VI, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1963

Philipus M. Hadjon, dkk ,*Pengantar Hukum Perizinan*, Cetakan J, Penerbit Yuridika, Surabaya, 1993

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006

Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, PT. Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1985

Ridwan, Juniarto dan Sodik Sudrajat, achmad. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa. 2009

Moenir, HAS. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. Teori pada buku yang di terbitkan oleh Kasmir pada tahun 2005

### 2. Jurnal

Departemen Kesehatan RI. *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat* 2010. Jakarta, 1999

Lembaga Administrasi Negara RI. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jilid II*; Gunung Agung, Jakarta, 1995

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan  
Keuangan *Tinjauan Ekonomi & Keuangan Daerah Jambi*

### 3. PeraturanPerundang-undangan

- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Refraksionis Optisien dan Optometris;
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
- Peraturan Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### 4. Website

<http://www.ilmuekonomi.net/2015/12/dampak-positif-dan-negatif-otonomi-daerah.html>, diakses pada tanggal 23 Mei 2016

<http://rinodpk.blogspot.co.id/2013/11/51definisi-wewenang-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2016

<https://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2016